

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD PERIODE 2024-2029
DALAM MENYERAP DAN MENYALURKAN ASPIRASI DI KABUPATEN
BULUNGAN***Political Communication Strategy of Members of the Regional House of
Representatives (DPRD) Members for the 2024-2029 Term in Absorbing and
Channeling Public Aspirations in Bulungan Regency***Nama Penulis** ✉Slamet Widodo^{1*}, Nur Alim Djalil², Mujahid³^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.*Email: eswidodo@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk strategi komunikasi politik yang digunakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam menjangkau aspirasi masyarakat dan menganalisis implikasi strategi komunikasi politik anggota DPRD terhadap kualitas representasi politik di Kabupaten Bulungan, khususnya dalam aspek keterwakilan, responsivitas, dan legitimasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan dan analisis data secara partisipatif non-intervensif di Kabupaten Bulungan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 17 informan yang terdiri dari anggota DPRD, sekretariat DPRD, tokoh masyarakat, dan perwakilan konstituen yang dipilih secara purposive untuk memperoleh data primer yang mendalam serta data sekunder dari dokumen resmi, regulasi, dan literatur terkait; data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu agar hasil penelitian valid, objektif, dan komprehensif. Hasil Penelitian ini menemukan bentuk strategi komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam menjangkau aspirasi masyarakat dilakukan melalui kombinasi pendekatan formal seperti reses, rapat DPRD, Musrenbang, dan Pokir serta pendekatan informal melalui kunjungan lapangan, komunikasi interpersonal, dan media digital seperti WhatsApp yang bersifat komunikatif, partisipatif, dan segmentatif dengan pola komunikasi dialogis-interaktif meskipun masih didominasi komunikasi langsung di lapangan sebagai sarana utama penyerapan aspirasi masyarakat. Implikasi strategi tersebut terhadap kualitas representasi politik di Kabupaten Bulungan menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat keterhubungan, responsivitas, dan legitimasi DPRD, namun efektivitasnya belum optimal karena masih terkendala implementasi kebijakan, keterbatasan anggaran, birokrasi, serta sinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Komunikasi politik; Strategi komunikasi; Representasi politik; Responsivitas politik; Aspirasi masyarakat.

Abstract

This study aims to identify and analyze the forms of political communication strategies used by members of the Bulungan Regency DPRD in collecting public aspirations and to examine the implications of these strategies on the quality of political representation in Bulungan Regency, particularly in terms of representation, responsiveness, and political legitimacy. This research employs a descriptive-analytical qualitative approach, with the researcher acting as the key instrument in conducting non-interventionist participatory data collection and analysis in Bulungan Regency through interviews, observation, and documentation involving 17 informants consisting of DPRD members, DPRD secretariat staff, community leaders, and constituent representatives selected through purposive sampling to obtain in-depth primary data as well as secondary data from official documents, regulations, and relevant literature. The data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated through source, method, and time triangulation to ensure the findings are valid, objective, and comprehensive. The findings of this study show that the forms of political communication strategies of DPRD members in Bulungan Regency in absorbing public aspirations are carried out through a combination of formal approaches such as recess sessions, DPRD meetings, Musrenbang, and Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), as well as informal approaches through field visits, interpersonal communication, and digital media such as WhatsApp, which are communicative, participatory, and segmentative in nature, with a dialogic-interactive communication pattern although still dominated by direct face-to-face communication in the field as the main means of absorbing public aspirations. The implications of these strategies on the quality of political representation in Bulungan Regency show a significant effect in strengthening connectivity, responsiveness, and legitimacy of the DPRD; however, their effectiveness is not yet optimal due to constraints in policy implementation, budget limitations, bureaucracy, and synchronization with the local government.

Keywords: Political communication; Communication strategy; Political representation; Political responsiveness; Public aspirations...

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran sentral sebagai lembaga representasi yang bertugas menyalurkan kepentingan masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan daerah. Fungsi representasi ini diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan seperti reses, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke daerah pemilihan, serta forum dialog publik. Melalui berbagai sarana tersebut, anggota DPRD diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif antara kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan keputusan strategis dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Terlepas dari fungsi idealnya, efektivitas penyerapan aspirasi di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan struktural dan operasional. Berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses umumnya berfokus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, tidak semua aspirasi tersebut dapat dengan mudah diakomodasi ke dalam kebijakan publik akibat adanya dinamika prioritas pembangunan dan keterbatasan anggaran daerah.

Di Kabupaten Bulungan, penjangkaran aspirasi dilaksanakan secara rutin melalui agenda reses anggota DPRD dalam tiga kali masa sidang setiap tahunnya. Kinerja

penyerapan ini menghasilkan volume usulan yang sangat tinggi, di mana dalam satu tahun masa sidang terkumpul sekitar 1.500 hingga 2.000 aspirasi yang mencakup pelbagai sektor pembangunan di daerah pemilihan. Aspirasi tersebut kemudian didokumentasikan oleh Sekretariat DPRD untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Meskipun demikian, kapasitas fiskal dan skema prioritas daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan yang cukup lebar antara jumlah usulan dengan realisasi program. Laporan kegiatan reses menunjukkan bahwa tingkat realisasi aspirasi masyarakat yang berhasil masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) umumnya hanya berada pada kisaran 30% hingga 60%. Secara konkret, dari sekitar 1.800 aspirasi yang diajukan dalam satu tahun, hanya terdapat sekitar 540 hingga 1.080 usulan yang mampu diwujudkan menjadi program pembangunan nyata, sementara sisanya tidak terakomodasi.

Tingginya porsi aspirasi yang tidak terealisasi ini berpotensi memicu persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja dan responsivitas DPRD. Ketika publik merasa usulannya diabaikan, tingkat kepercayaan terhadap lembaga legislatif dapat menurun secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, di mana kelompok tertentu tampil sangat dominan, sedangkan kelompok lainnya cenderung pasif atau menghadapi hambatan aksesibilitas dalam menyampaikan keluhan mereka.

Hambatan dalam penyerapan aspirasi di Kabupaten Bulungan juga dipengaruhi secara kuat oleh kondisi geografis wilayah. Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan memiliki bentang alam yang luas dengan sebaran permukiman penduduk yang terpisah di berbagai desa dan wilayah pedalaman. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi di wilayah-wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota DPRD untuk menjangkau seluruh konstituen secara adil dan merata.

Selain faktor geografis, kompleksitas penyerapan aspirasi juga dipengaruhi oleh heterogenitas demografis dan budaya masyarakat Kabupaten Bulungan. Masyarakat di daerah ini terdiri dari beragam suku bangsa, seperti Bulungan, Dayak, Tidung, Bugis, Makassar, hingga Jawa. Setiap kelompok etnis memiliki pola komunikasi, nilai sosial, dan kearifan lokal yang berbeda dalam menyampaikan harapan politik mereka. Ketidakmampuan menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan keragaman budaya tersebut dapat menghambat keterbukaan masyarakat dalam mengekspresikan aspirasinya.

Proses penyampaian aspirasi sendiri berlangsung melalui saluran formal maupun informal. Saluran formal mencakup reses dan rapat dengar pendapat, sedangkan saluran informal berlangsung melalui interaksi sosial harian dan kunjungan lapangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan media sosial dan kehumasan DPRD mulai digunakan sebagai sarana komunikasi politik modern. Namun, efektivitas media digital ini masih terkendala oleh kesenjangan akses internet di beberapa wilayah pedalaman Bulungan.

Permasalahan lain yang kerap melemahkan hubungan antara DPRD dan konstituen adalah belum optimalnya mekanisme umpan balik. Masyarakat jarang mendapatkan informasi yang jelas mengenai status tindak lanjut dari aspirasi yang telah mereka ajukan, apakah diterima, ditunda, atau ditolak karena keterbatasan anggaran. Ketidadaan transparansi informasi ini menciptakan kesan bahwa penyerapan aspirasi hanya sebatas formalitas prosedural tanpa ada pertanggungjawaban publik yang memadai. Berdasarkan dinamika dan kompleksitas tersebut, keberhasilan penyerapan aspirasi masyarakat sangat bergantung pada efektivitas strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh wakil rakyat. Strategi komunikasi yang adaptif, transparan, dan inklusif menjadi prasyarat mutlak untuk menjembatani perbedaan budaya, hambatan geografis, serta keterbatasan anggaran. Atas dasar pemikiran ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai "Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2024-2029 dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat serta Implikasinya terhadap Kualitas Representasi Politik di Daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif kualitatif diarahkan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, objektif, dan mendalam mengenai fakta, karakteristik, serta keterkaitan antarfenomena yang menjadi fokus kajian penelitian (Nazir, 2013:54).

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci yang secara langsung melakukan proses pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data di lapangan (Moleong, 2019). Peran tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif peneliti dalam mengamati kondisi empiris, melaksanakan wawancara mendalam dengan informan yang relevan, serta menelaah dokumen- 46 dokumen yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik anggota DPRD di Kabupaten Bulungan.

Informan penelitian ini dipilih menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses komunikasi politik dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Bulungan.

Secara keseluruhan, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 17 orang, yang terdiri dari unsur anggota DPRD, sekretariat DPRD, tokoh masyarakat, serta perwakilan konstituen. Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang 51 komprehensif mengenai strategi komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat serta implikasinya terhadap kualitas representasi politik di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dilaksanakan melalui penggabungan pendekatan formal dan informal secara terpadu. Pendekatan formal direalisasikan melalui instrumen konstitusional seperti kegiatan reses, rapat DPRD, Musrenbang, serta mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang menjadi saluran resmi penyerapan dan penyaluran aspirasi. Di sisi lain, pendekatan informal diterapkan melalui kegiatan blusukan, kunjungan lapangan, komunikasi personal, hingga pemanfaatan media digital seperti WhatsApp untuk merespons kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak. Dari aspek substansi, pesan politik difokuskan pada isu-isu krusial mencakup pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal. Penyampaian pesan tersebut diimbangi dengan strategi segmentasi khalayak yang terarah pada kelompok pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan kelompok profesi, sehingga menghasilkan dampak positif berupa peningkatan partisipasi publik dalam forum-forum reses.

Secara teoretis, praktik komunikasi politik DPRD Kabupaten Bulungan ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa kerangka konseptual utama. Mengacu pada pandangan Dan Nimmo, seluruh aktivitas penyampaian pesan antara wakil rakyat dan konstituen di Bulungan merupakan proses komunikasi politik yang memengaruhi dinamika sistem politik daerah. Dalam perspektif teori sistem politik David Easton, DPRD menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat sebagai masukan yang diolah menjadi kebijakan publik. Selain itu, pengintegrasian komponen komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek pada penelitian ini sejalan dengan konsep strategi komunikasi politik dari Hafied Cangara. Adaptasi penggunaan media digital di samping saluran langsung juga mencerminkan penerapan teori media Denis McQuail mengenai peran media dalam membentuk persepsi publik dan memfasilitasi komunikasi interaktif di era modern.

Temuan penelitian ini juga memperkuat dan memperluas hasil-hasil studi terdahulu mengenai efektivitas komunikasi politik di lembaga legislatif. Keselarasan terlihat pada penelitian Randa Fransiskoa dkk. (2020) serta Syahrudin dkk. (2023) yang menegaskan pentingnya pengaruh figur tokoh, segmentasi khalayak, dan pemilihan media dalam keberhasilan penyampaian pesan politik. Sementara itu, keterbatasan waktu reses dan kendala teknis penyerapan aspirasi yang ditemukan di Bulungan sejalan dengan temuan Rizky Abdul Malik (2021) dan Lisa Kurnia dkk. (2022). Lebih lanjut, penerapan strategi komunikasi hibrida yang memadukan interaksi tatap muka dan media digital mendukung studi terbaru dari Nur'annafi Farni Syam Maella dkk. (2025) mengenai perlunya fleksibilitas saluran komunikasi pada era pergeseran pola interaksi publik.

Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa pilihan strategi komunikasi Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi oleh realitas geografis dan demografis lokal. Wilayah Kabupaten Bulungan yang luas dengan sebaran pemukiman terisolasi serta keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di area

pedalaman menjadikan pendekatan tatap muka secara langsung tetap sebagai opsi paling dapat diandalkan. Kunjungan lapangan dan dialog langsung terbukti menjadi sarana utama yang paling efektif untuk menjangkau konstituen secara luas dan mendalam, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses internet yang memadai. Ketidakpastian yang tidak dikelola berpotensi memicu kesalahan prosedur operasional dan ketegangan hubungan kerja.

Di samping faktor teknis geografis, hubungan personal yang terbangun antara anggota legislatif dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memelihara kepercayaan politik. Masyarakat Bulungan cenderung memberikan respons yang lebih terbuka dan positif kepada wakil rakyat yang memiliki kedekatan emosional serta kepedulian sosial yang nyata. Namun demikian, proses komunikasi politik ini masih menghadapi kendala krusial, seperti belum meratanya tingkat literasi politik masyarakat serta munculnya ekspektasi publik yang sering kali bersinggungan dengan keterbatasan anggaran dan kerumitan prosedur birokrasi pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bulungan merupakan bentuk konvergensi antara teori komunikasi politik modern dan penyesuaian empiris di lapangan. Pola komunikasi yang terbangun bersifat dinamis, fleksibel, dan kontekstual terhadap karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Dengan memadukan saluran formal yang tertib administrasi, saluran informal yang humanis, serta kepekaan terhadap kearifan lokal, DPRD Kabupaten Bulungan mampu menjalankan fungsi representasi politik secara lebih adaptif dalam merespons aspirasi konstituennya.

2. Implikasi Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD terhadap Kualitas Representasi Politik di Kabupaten Bulungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Bulungan memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan kualitas representasi politik, khususnya pada aspek keterwakilan aspirasi masyarakat. Penerapan kombinasi saluran komunikasi—mulai dari reses, kunjungan lapangan, dialog interpersonal, hingga pemanfaatan media digital—berhasil mempererat keterikatan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kedekatan sosial ini memfasilitasi proses identifikasi kebutuhan publik secara lebih cepat dan akurat, yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan formal melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan forum Musrenbang.

Meskipun strategi komunikasi yang diterapkan mampu meningkatkan responsivitas dan partisipasi politik masyarakat, efektivitas representasi politik secara keseluruhan belum mencapai tingkat yang optimal. Keterbatasan kapasitas anggaran daerah, hambatan birokrasi, serta rumitnya proses sinkronisasi program dengan pemerintah daerah kerap menjadi ganjalan dalam merealisasikan aspirasi publik secara tepat waktu.

Kendati demikian, keberadaan ruang-ruang komunikasi yang terbuka secara konsisten mampu memelihara keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal agenda pembangunan di tingkat local. Secara teoretis, dinamika representasi politik ini selaras dengan landasan konseptual komunikasi dan sistem politik. Berdasarkan teori komunikasi politik Dan Nimmo serta teori sistem politik David Easton, aktivitas komunikasi anggota dewan berfungsi sebagai saluran penyampaian aspirasi publik yang memengaruhi perumusan kebijakan daerah. Selain itu, kualitas representasi ini tercermin dalam konsep Hanna Fenichel Pitkin yang menggarisbawahi pentingnya dimensi substantif dan responsif. Pendekatan komunikasi dialogis serta partisipatoris, sebagaimana ditinjau oleh Firmanzah, mengukuhkan peran DPRD tidak hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan instrumen negara secara terbuka dan akuntabel.

Temuan ini menguatkan berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam membangun kualitas representasi. Studi Syahrudin dkk. (2023) serta Ade Arif Saefudin dkk. (2023) mengonfirmasi bahwa pengintegrasian elemen komunikator, pesan, dan media secara mendalam menentukan tingkat keterwakilan politik. Sementara itu, ruang dialog seperti forum reses dan musyawarah yang ditemukan di Bulungan sejalan dengan pemikiran Lisa Kurnia dkk. (2022) serta Dzikri Muhamad Maulansyah (2025) terkait pentingnya komunikasi dialogis dan negosiasi lintas kepentingan. Penggunaan saluran digital di samping media konvensional juga mendukung temuan Fransisika Silolongan dkk. (2023) dan Berliani Ardha (2025) bahwa digitalisasi mampu memperpendek jarak psikologis antara wakil rakyat dan konstituen.

Secara faktual, efektivitas komunikasi politik DPRD Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang luas, keanekaragaman demografis, serta keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di area tertentu. Kondisi ini menuntut interaksi langsung melalui kunjungan lapangan dan pendekatan personal tetap dipertahankan sebagai sarana utama penyokong legitimasi politik. Meskipun demikian, tantangan berupa kesenjangan literasi politik dan tingginya ekspektasi masyarakat yang tidak selalu selaras dengan mekanisme birokrasi masih perlu diatasi. Secara umum, implikasi strategi komunikasi politik terhadap kualitas representasi politik di Kabupaten Bulungan bernilai positif, namun tetap memerlukan penguatan berkelanjutan pada aspek koordinasi dan eksekusi kebijakan.

SIMPULAN

Merujuk pada hasil dan pembahasan tentang bentuk strategi komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam menjaring aspirasi masyarakat serta implikasi strategi komunikasi politik anggota DPRD terhadap kualitas representasi politik di Kabupaten Bulungan, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk strategi komunikasi politik Anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam menjaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui kombinasi pendekatan formal dan informal. Pendekatan formal meliputi reses, rapat DPRD, Musrenbang, serta mekanisme Pokok- Pokok Pikiran (Pokir), sedangkan pendekatan informal dilakukan melalui kunjungan lapangan, komunikasi interpersonal, dan pemanfaatan media digital seperti WhatsApp. Strategi komunikasi ini bersifat komunikatif, partisipatif, dan segmentatif dengan menyesuaikan kelompok masyarakat seperti tokoh, pemuda, dan kelompok sosial tertentu. Secara umum, pola komunikasi yang terbentuk adalah dialogis dan interaktif, meskipun masih didominasi oleh komunikasi langsung di lapangan sebagai sarana utama penyerapan aspirasi masyarakat.
2. Implikasi strategi komunikasi politik Anggota DPRD terhadap kualitas representasi politik di Kabupaten Bulungan menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan keterhubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Strategi komunikasi yang intens melalui reses, dialog langsung, dan media digital memperkuat aspek keterwakilan, responsivitas, dan legitimasi DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat. Namun demikian, kualitas representasi politik masih menghadapi kendala pada tahap implementasi kebijakan akibat keterbatasan anggaran, birokrasi, dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, strategi komunikasi politik berimplikasi positif terhadap kualitas representasi, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya optimal dalam aspek realisasi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Sage.
2. Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
3. Alvin, S. (2022). Strategi komunikasi politik caleg PSI lolos DPRD Kota Bandung di Pemilu 2019. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(4), 312–323. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i4.1167>
4. Amalia, A., Umran, L. O. M., & Larisu, Z. (2023). Strategi komunikasi politik caleg DPRD PKS Kabupaten Konawe pada masa Pemilu 2019–2024. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(2).
5. Ardha, B. (2025). Strategi komunikasi politik digital calon legislatif di media sosial: Studi kasus platform Twitter dan Facebook. *Jurnal Riset Komunikasi*, 16(1). <https://doi.org/10.31506/JRK.V16i1.78160>
6. Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
7. Cangara, H. (2016). *Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers.
8. Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi keempat. Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

7. Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis*. Routledge. Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
8. Effendi, O. U. (2013). *Ilmu komunikasi teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.
9. Firmanzah. (2012). *Marketing politik*. Yayasan Obor Indonesia. Heywood, A. (2019). *Politics*. Palgrave Macmillan.
10. Fransiskoa, R., Simatupang, H. D., Siallagan, A., & Mutawakkil, F. A. (2020). Strategi komunikasi politik Partai Golongan Karya dalam memenangkan Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2019-2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 4(1), 1-7.
11. Gunanto, D., Andriyani, L., & Sahrul, M. (2020). Strategi komunikasi politik calon legislatif terpilih DPRD Tangerang Selatan dalam Pemilu tahun 2019 (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia). *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4(2), 131-136.
12. Hafizni, M. (2025). Komunikasi politik anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok (Studi fenomenologi terpilihnya Fauzan Khalid pada Pemilu legislatif 2024). *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 5(2), 543-550. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v5i2.3101>
13. Indrayanti, E., & Zulaikha. (2025). Pola komunikasi anggota legislatif dengan konstituennya di Surabaya. *Community Engagement & Emergence Journal*, 6(5), 2740-2745.
14. Kurnia, L., Sarmiati, & Arif, E. (2022). Komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 5(1).
15. Malik, R. A. (2021). Komunikasi politik (Studi kegiatan masa reses anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya periode 2014-2019). *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1).
16. Maulansyah, D. M. (2025). Strategi komunikasi politik pimpinan Komisi I DPRD Sumedang dalam optimalisasi fungsi legislatif dan representasi aspiratif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17011- 17017.
17. McNair, B. (2018). *An introduction to political communication*. Routledge.
18. McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage.
19. Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
20. Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
21. Nimmo, D. (2011). *Political communication and public opinion*. Transaction Publishers.
22. Pisma, A. (2024). Utilisasi media sosial dan branding politik (Studi terhadap penggunaan media sosial anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah periode 2019-2024). *Journal of Social Contemplativa*, 2(2), 127-148.
23. Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
24. Rezkiawan, A., Yahya, M., & Rina, D. (2022). Komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2).
25. Saefudin, A. A., Sarjono, H. S., & Aji, H. K. (2023). Strategi komunikasi politik Eko Muji Suharto dari PDI Perjuangan dalam memenangkan kursi anggota DPRD Sragen pada Pemilu legislatif tahun 2019. *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 7(2), 1-8.

24. Shiddiqi, I. H. A., Vitasari, L., & Priyanto, H. (2024). Strategi komunikasi calon legislatif muda pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 64–77.
25. Silolongan, F., Ambarwati, & Ayuna, N. E. (2023). Strategi komunikasi politik Ketua DPRD DKI Jakarta pada konstituen dengan memanfaatkan media sosial Facebook. *Journal Syntax Idea*, 5(9).
26. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
27. Syahrudin, Nasir, L. O. M., & Menungsa, A. S. (2023). Strategi komunikasi politik anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(1), 44–52.
28. Triapriliyany, Y., Syawaludin, M., & Viana, R. C. E. (2020). Strategi politik dalam Pileg 2019 Danu Mirwando calon legislatif DPRD dari Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(3), 226– 237.
29. Ubaidillah. (2025). Strategi komunikasi politik Mujid Riduan dalam kecenderungan perilaku pemilih Dapil 3 Kabupaten Gresik. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi (JRMDK)*, 7(2), 278– 296.
30. Wahid, M., Ningsih, F. P., Utama, R. R., Zuhdi, A. Z., Siruah, W. A., & Safitri, M. (2024). Media sosial sebagai sarana komunikasi politik dalam pemilihan calon legislatif di DPRD Sulteng tahun 2024. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(6).
31. Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam mempertahankan suara partai sebagai partai tengah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 832–842.